BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Ilmu pengetahuan telah mengubah peradaban sebuah teori klasik menjadi teori manajemen modern. Kontribusi ilmu manajemen modern menjadi babak baru lahirnya teori agensi. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen and Meckling pada tahun 1976. Sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yaitu : manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded-rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk-averse*).

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan.

Hubungan tersebut akan terjadi kapan pun seseorang (pemilik) akan memperkerjakan pihak lain (*agent*) untuk mewakili kepentingan – kepentingannya. Sebagai contoh, anda akan memperkerjakan seseorang (seorang agen) untuk menjual mobil yang anda miliki saat anda berada di sekolah. Pada seluruh hubungan keagenan, terdapat kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara pemilik dan agennya. Benturan kepentingan tersebut disebut dengan permasalahan keagenan (*agency problem*).

Anggap anda menuggasi seseorang untuk menjual mobil anda dan sepakat untuk membayar penuh upah yang tetap untuk orang tersebut saat dia berhasil menjualnya. Insentif bagi agen dalam kasus ini adalah hanya menjual mobil, tanpa harus mendapatkan harga jual yang terbaik untuk mobil anda. Jika anda menawarkan komisi, katakanlah 10 persen dari harga jual mobil, bukan upah yang tetap, permasalahan tersebut tidak akan terjadi. Contoh ini mengilustrasikan bahwa ternyata cara pemilik memberikan komisi kepada seseorang agennya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permasalah – permasalahan keagenan.

Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manager (*agent*) dimana untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang. Dengan adanya GCG, tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimalkan nilai pemegang saham. Oleh karena adanya perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer lebih kecil jika dibandingkan dengan kemakmuran yang dirasakan oleh pemegang saham, sehingga majer cenderung untuk mencari keuntungan sendiri (*modal hazard*). Hal ini dilakukan karena manajer menganggap ia memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dan itu tidak dimiliki oleh principal (*asymmetric information*).

2.1.2. Good Corporate Governance

2.1.2.1. **Pengertian *Good Corporate Governance***

Menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) dalam Arif Efendi (2016: 2)" *corporate governance is a company's system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company's assets and enhacing over time the value of the shareholders investment"* dapat diartikan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) dalam Arif Efendi (2016: 3), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan anatara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan.

Sesuai pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelela perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang selanjutnya disebut dengan GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu

proses dan mekanisme pengelolahaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha.

Dalam buku Hamdani (2016) berjudul *Good Corporate Governance* Tinjauan Etika dalam Pratik Bisnis, ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu sudut pandang dalam arti sempit (*narrow view*) dan sudut pandang dalam pengertian arti luas (*broad view*). Dalam sudut pandang yang sempit, GCG diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham. Pada sudut pandang yang lebih luas, GCG sebagai *a web of relationship*, tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan denan pihak petaruh (*stakeholders*) lain : karyawan, pelanggan, pemasok, bondholders dan lainny.

Berdasarkan pengertian diatas, secara singkat *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan perusahaan dalam mengelolah usahanya secara profesional berdasarkan prinsip prinsip yang telah ditentukan.

2.1.2.2. Prinsip – prinsip Corporate Governance

Prinsip – prinsip GCG dapat dikenal dengan singkatan TARIF. Berikut penjelasan masing –masing prinsip GCG dalam Arief Effendi (2016: 11):

1. Prinsip Transparansi

Transparansi (*Transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yeng menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai berikut :

a. Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material.

b. Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi di bidang akuntansi, pengungkapan keuangan dan non-keuangan, serta audit.

c. Pemerikasaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor indepeden untuk menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyiapan dan penyajian laporan keuangan.

d. Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (*division of authority*) antar-organ perusahaan serta mengurangi dampak dari *agency problem* yang timbul akibat perbedaan kepentingan antar manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Tiga tingkatan akuntabiitas, yaitu sebagai berikut :

a. Akuntabilitas individual

Akuntabilitas individual merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan – bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah pihak, baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.

b. Akuntabilitas tim

Akuntabilitas tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai.

c. Akuntabilitas korporasi

Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya.

3. Prinsip Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang – undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayahkan kemitraan dengan semua pemangku

kepentingan dalam batas – batas peraturan perundang – undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. Prinsip Independensi

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keseharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak – pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

5. Prinsip *Fairness* (Kesetaraan)

Kesetaraan mangandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham harus mendapat perlakuan yang sama pula, sesuai ketentuan berikut :

a. Dikelas manapun, semua pemegang saham harus memiliki hak suara yang sama. Semua investor harus mendapat informasi tentang hak suara yang melekat pada semua kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam hak – hak suara harus mendapat persetujuan pemegang saham.

b. Suara harus disampaikan oleh para *custodian* atau *hominoes* dengan cara yang disetujui oleh pemilik saham.

c. Proses dan prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memungkinkan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membutuhkan biaya mahal untuk menyampaikan suara.

d. Transaksi orang dalam (*insider tranding*) dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan orang dalam sendiri harus dilarang

e. Anggota dewan komisaris dan direksi serta para manajer harus mengungkapkan setia kepentinan yang bersifat hutang atau transaksi atau hak – hak yang berpengruh terhadap perusahaan.

2.1.2.3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerapan GCG

Pelaksanaan GCG terdapat perbedaan pelaksanaan di setiap Negara, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor anatara lain seperti kerangka hukum, maupun hal – hal yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh yang luar biasa pada tingkat keberhasilan penerapan prinsip – prinsip *governance* yang baik.

Penerapan GCG pada masing – masing Negara sangat ditentukan oleh sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Berkaitan dengan sistem ekonomi, GCG tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun harus dialakukan bersama. Perkembangan pasar modal dan sektor keuangan, terutama sektor perbankan sangat mempengaruhi efektivitas penerapan GCG. Selain faktor tersebut, penerapan GCG sangat ditentukan oleh tiga pilar, yaitu :

1. Negara dan perangkatnya, menciptakan peraturan perundang – undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang – undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*). Peran Negara sangat menentukan keberhasilan GCG. Oleh karenannya Negara mempunya peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintah yang bersih. Negara yang tidak menyelenggarakan prinsip – prinsip *good governance* (GG) akan memiliki kredibilitas yang rendah, kinerja yang rendah, korupsi yang merajarela serta tidak terciptanya kepastian hukum.

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. GCG menjadi sebuah keniscayaan, mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh organ – organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi) harus dilakukan dalam kerangka pemenuhan hak dan tanggung jawab seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas yang notabenenya dikuasai oleh publik, atas dasar kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan anggaran dasar perusahaan.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang dampak dari keberadapan perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan control social secara objektif dan bertanggung jawab.

2.1.2.4. Struktur *Good Corporate Governance*

Struktur *Good Corporate Governance* dalam Hamdani (2016 :82-93), yaitu menggunakan :

1. Dewan Komisaris

   Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing – masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip – prinsip berikut :

   a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
   b. Anggota Dewan Komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
   c. Fungsi pegawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

   Ukuran Dewan Komisaris diukur melalui jumlah anggota Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan agar tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

2. Direksi

   Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing – masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan seseuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing – masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Jumlah anggota Direksi

harus diseuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

3. Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa :

a. Laporan keunagan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik

c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

d. Tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajmen.

Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan degan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketahui oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah satu anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

4. Sekertaris Perusahaan

Sekertaris perusahaan memiliki peranan penting dalam implementasi GCG, khususnya pada perusahaan publik dan emiten di bursa. Hal tersebut disebabkan bahwa posisi dan tugas atau fungsi yang diemban oleh sekertaris perusahaan sangatlah strategis serta menentukan karena merupakan ujung tombak perusahaan dengan pihak ketiga. Beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8

Desember 2014 tentang Sekertaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, peraturan tersebut terdiri atas beberapa pasar, antara lain menjelasakan mengenai :

a. Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa sekertaris perusahaan adalah orang-perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekertaris perusahaan.
b. Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa situs web adalah kumpulan laman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
c. Pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi sekertaris perusahaan.
d. Pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa fungsi sekertaris perusahaan dilaksanakan oleh orang-perseorangan atau unit kerja. Unit kerja dipimpin oleh seseorang penanggung jawab.
e. Pasal 3, menyatakan mengenai tugas dan tanggung jawab sekertaris perusahaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa fungsi sekertaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:
    1) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
    2) Memberikan masukan kedapa direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
    3) Membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
        a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik.
        b) Penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan tepat waktu.
        c) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang saham
        d) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi dan atau dewan komisaris, dan
        e) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi dan atau dewan komisaris.

4) Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, otoritas jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.3. Asimetri Informasi

Asimetri Informasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan antara jumlah informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan jumlah informasi yang dimiliki oleh pihak diluar perusahaan. Menurut Hendriksen dan Breda (2001) dalam Mustikawati (2015) menyatakan bahwa, asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana muncul suatu masalah yang disebabkan oleh ketidaklengkapan informasi, yaitu ketika manajer mengetahui informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham. Scott (2000) dalam Arri Wiyardi (2013, vol 1) terdapat dua macam asimetri informasi :

1. Adverse Selection, yaitu para manajer dan orang – orang di dalam suatu perusahaan lebih banyak mengetahui kondisi perusahaan dan prospek kedepan perusahaan daripada pihak luar.

2. Moral Hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Timbulnya asimetri informasi didasari oleh konflik antara manajer dan pemegang saham dimana perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer jauh lebih kecil daripada pemegang saham, yang memicu terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajer. Asimetri dapat diukur dengan menggunakan *Relative Bid-Ask Speard* yang dilihat dari selisih harga jual dan harga beli saham perusahaan selama satu tahun Helay (1999) dalam Restuwulan (2013), dimana menggambarkan terjadinya perbedaan informasi antara *principal* dan *agen*t dengan melihat harga *Bid* dan *ask* maka bisa menggambarkan manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Jika *Speard* terjadi di dalam perusahaan tinggi, maka kemungkinan terjadi manajemen laba dalam organ perusahaan. Namun jika *spread* yang terjadi di dalam perusahaan rendah, maka tindakan manajemen laba dalam organ perusahaan rendah. Menurut Subali dan Diana Zuhroh (2002) dalam Theresia 2011 Bid-ask spread merupakan selisih antara harga beli tinggi (*Bid*) yang menyebabkan investor untuk membeli saham

tertentu dengan harga jual (*Ask*) terendah menyebabkan investor menjual sahamnya.

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Brigham dan Houtson (2006 : 117) dalam Otty Marlisa 2016 menyatakan ukuran perusahaan merupakan perusahaan dengan rata – rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun.

Ukuran perusahaan dapat dikalsifikasikan menjadi besar dan kecilnya perusahaan dengan beberapa cara diantaranya total asset, total penjualan, nilai saham. Jika semakin besar total asset, total penjualan, dan nilai saham perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki ukuran perusahaan yang besar.

Ketika penjualan meningkat dalam suatu perusahaan dan dihadapkan dengan kebutahan dana yang meningkat, sumber daya yang sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana dari eksternal perusahaan. Hal ini membuat manajemen akan melakukan praktik manajemen laba dengan meningkatkan laba perusahaan agar perusahaan dapat menarik investor baru dan memperoleh pinjaman dari luar perusahaan.

Menurut Ayu Yuni (2017) pengertian ukuran perusahaan adalah mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam bentuk besar kecilnya perusahaan dan dapat diukur dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total asset.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log}(\text{Total Aset})$$

2.1.5. Manajemen Laba

2.1.5.1. Pengertian Manajemen Laba

Rahmawati (2012 : 112) dalam buku yang berjudul “Teori Akuntansi keuangan” menjelaskan bahwa jika manajemen laba yang digunakan secara terlalu ekstrim maka investor akan kehilangan kepercayaan pada pelaporan keuangan. Banyak alasan kuat yang menyebabkan manajer – manajer tertarik untuk merubah pilihan kebijakan (misalnya GAAP), yang secara alamiah diharapkan mereka memilih kebijakan untuk memaksimalkan kegunaan (manfaat) mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Tindakan itulah yang dinamakan manajemen laba. Pemahaman manajemen laba penting bagi akuntan karena dapat meningkatkan pemahaman tentang manfaat laba bersih baik untuk pelaporan investor dan untuk kontrak.

Manajemen laba adalah pilihan manajer tentang kebiijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan khusus. Pilihan kebijakan akuntansi dibagi menjadi 2 kategori :

1. Pilihan kebijakan akuntansi dari garis lurus ke amortisasi saldo menurun atau kebijakan dalam pegakuan pendapatan.
2. Akrual kebijakan seperti : provisi kerugian kredit , biaya jaminan, dan nilai persediaan.

2.1.5.2. Motivasi Manajemen Laba

Paper Healy (1985) dalam Rahmawati (2012 : 112) yang berjudul pengaruh skema bonus pada keputusan akuntansi mungkin jadi penyelidikan empiris manajemen laba yang terkenal baik. Manajer mempunyai informasi yang berlebih tentang laba bersih perusahaan sebelum manajemen laba. Healy memprediksi bahwa manajer mempunyai kesempatan mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka dengan program kompensasi perusahaan mereka. Hearly mempertimbangkan 2 pendekatan manajemen mengeola laba bersih :

1. Mengendalikan bermacam – macam akrual dimana akrual didefinisikan secara luas termasuk porsi item pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi yang tidak merepresentasikan aliran kas.
2. Perubahan kebijakan akuntansi

Penelitian Healy menyelidiki bahwa *earning* mempengaruhi adanya bonus. Manajemen laba adalah sebagai contoh motivasi kontraktual dimana insentif dari manajemen laba meningkat dari adanya karakeristik skema bonus yang kontrak antra perusahaan dengan manajer adalah suatu kumpulan dasar kompensasi manajerial.

Adanya motivasi kontraktual yang lain yaitu untuk meningkatkan kontrak hutang jangka panjang yang terdiri dari suatu perjanjian untuk melindungi kreditur dari tindakan manajer dengan bunga pinjaman yang baik, adanya dividen, tambahan pinjaman atau merendahkan modal kerja atau pemegang saham. Penelitian Sweeny (1994) dalam Rahmawati (2012:114) Manajemen laba dalam konteks perjanjian hutang ditemukan secara signifikan lebih besar menggunakan perubahan akuntansi dengan menaikkan laba dari pada sampel kontrolnya. Dia juga menemukan bahwa perusahaan default cenderung untuk mengambil adopsi lebih awal standar akuntansi baru ketika laba bersih yang dilaporkan meningkat.

Motivasi lain salah satunya adalah politik. Jones (1991) dalam rahmawati (2012 : 115) menemukan bahwa sampel perusahaan secara signifikan lebih besar menurunkan laba akrual selama penyelidikan ITC. Dimana perusahaan cenderung menurunkan laba perusahaan yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang ketat.

Pendapatan pajak adalah salah satu motivasi yang paling nyata dari manajemen laba. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. Laba fiskal (*book-tax differences*) dapat memberikan informasi tentang laba berjalan (*current earning*). Logika yang mendasarinya adalah sedikitnya kebebasan yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal, menyebabkan *book-tax differences* memberikan informasi tentang *management discretion* dan proses akrual. Mills dan Newberry (2001) dan Phillips et al. (2003) berpendapat bahwa para manajer mempunyai banyak kebebasan dalam pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak, dan dapat memanfaatkan kebebasannya untuk menaikkan laba akuntansi dengan suatu cara tertentu tanpa menaikkan laba fiskal dalam Rachmawati (2012:115).

2.1.5.3. Bentuk – bentuk Manajamen Laba

Rahmawati (2012 : 117) dalam buku yang berjudul "Teori Akuntansi keuangan" terdapat bentuk – bentuk manajemen laba sebagai berikut :

1. *Taking a Bath* : pola ini dijalankan ketika perusahaan dalam kondisi tertekan atau sedang melakukan reorganisasi atau petunjukkan CEO baru. Manajer cenderung melaporkan laba bersih yang rendah sekarang dengan harapan meningkat di masa yang akan datang. Penelitian Healy menemukan pola ini pada manajer yang mempunyai laba bersih dibawah batas bawah.
2. Minimisasi Laba : pola ini dilakukan jika perusahaan dalam kondisi laba yang tinggi maka untuk mengurangi visibilitasnya dia melakukan kebijakan minimisasi laba.
3. Maksimisasi Laba : pola ini dilakukan jika manajer ingin menaikkan bonusnya, dan dihadapkan ada perjanjian hutang yang hampir dilanggar.
4. Perataan Laba : pola ini paling sering dilakukan untuk mengantisipasi kondisi yang dihadapai perusahaan.

2.1.5.4. Teknik Manajemen Laba

Rahmawati (2012 : 145) dalam buku yang berjudul "Teori Akuntansi keuangan" terdapat cara manajemen melakukan menajemen laba yaitu sebagai berikut :

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
   Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain : estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, dan estimasi biaya garansi.
2. Mengubah metode akuntansi
   Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatata suatu transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan
   Beberapa orang menyebutkan rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan operasional (Fischer dan Rosenzweig, 1995; Bruns dan Merchant, 1990). Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai perode akuntansi berikutnya (Daley dan Vigeland, 1993), mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, kerja sama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengirim tagihan sampai periode akunatansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah dipakai (Bartov, 1993; Black, Dellers, dan Manly, 1998). Perusahaan yang mencatat persediaan menggunakan asusi LIFO, juga dapat merekayasa peningkatan laba melalui pengaturan saldo persediaan (Frankel dan Trezervant, 1994).

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Analisis	Persamaan	Perbedaan
1.	Andrie Mustika wati (2015)	Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi	*Moderated regression analysis*	1. Sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependent 2. Sama – sama menggunakan asimetri informasi sebagai varibel independent	1.Penelitian sebelumnya menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi sedangkan penelitian sekarang menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independent. 2.Penelitian sekarang menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai variabel independent
2.	Bimo Bayu Aji (2012)	Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia	Regresi Linear Berganda	1.Sama – sama menggunakan corporate *goveranance sebagai* variabel independent 2.Sama-sama menggunakan Manajemen Laba sebagai variabel dependent	1.Pelenitian terdahulu hanya menggunakan *corporate governance* sebagai variabel independent sedangkan penelitian saat ini menggunakan mekanisme *good corporate governance,* asimetri infomrasi dan ukuran perusahaan sebagai variabel independent.
3.	Sally Ruth Minar Agneste	Pengaruh Mekanisme Good Corporate	Regresi Linear Berganda	1. Sama – sama menggunakan Mekanisme *good corporate*	Penelitian terdahulu menggunakan *good corporate governance* dan motivasi

	sia Hutapea (2015)	Governance dan Motivasi Manajemen Laba terhadap Manajemen Laba pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013		*governance* sebagai variabel independent dan menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependent.	manajemen laba sebagai variavbel independent sedangkan penelitian sekarang menggunakan mekanisme *good corporate governance,* asimetri infomrasi dan ukuran perusahaan sebagai variabel independent.
4.	Indra Dewi Suryani (2010)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Ukuran Perussahaan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Regresi Berganda	Sama – sama menggunakan mekanisme *good corporate governance* dan ukuran perusahaan sebagai varibel independent dan menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependent	Penelitian terdahulu hanya menggunakan mekanisme good corporate governance dan ukuran perusahaan sebagai varibel independent sedangkan penelitian sekarang menggunakan mekanisme *good corporate governance,* asimetri infomrasi dan ukuran perusahaan sebagai variabel independent.

Sumber : Data diolah Penulis

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini digambarkan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

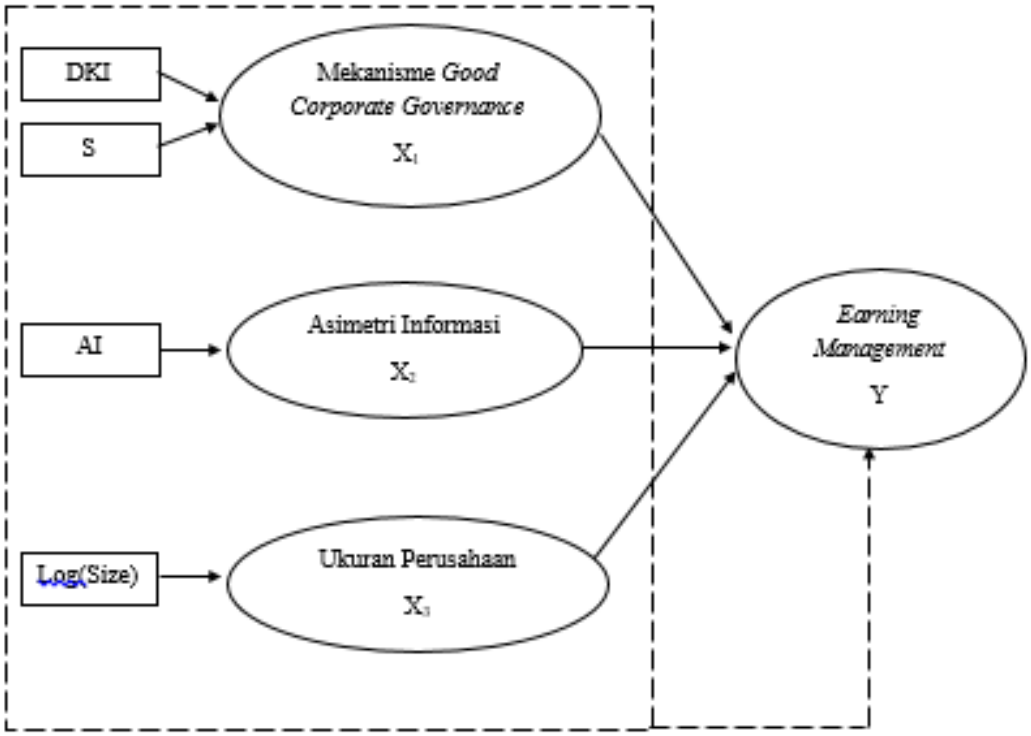

Sumber : Data diolah penulis

Keterangan :

X_1 : Mekanisme *Good Corporate Governance*

X_2 : Asimetri Informasi

X_3 : *Size* Perusahaan

Y : *Earning Management*

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara yang masih memerlukan pembuktian menurut Hadi (2002) dalam widodo (2017:58). Karena hanya dugaan, maka hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk "pernytaan" dan sinkron dengan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, kajian tinjauan pustaka, dan kerangka konseptual yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *earning management*

H_2 : Asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap *earning management*

H_3 : *Size* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *earning management*